

**ANALISIS PERANAN KEPALA KELURAHAN
DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN IPILO
KECAMATAN KOTA TIMUR
KOTA GORONTALO**

**OLEH
NOVITA DJAFAR
NIM. S2118027**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
ANALISIS PERANAN KEPALA KELURAHAN DALAM
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN IPILO KECAMATAN KOTA TIMUR
KOTA GORONTALO

Oleh:

NOVITA DJAFAR

S2118027

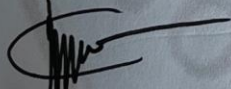
SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Telah disetujui dan diseminarkan,
Gorontalo, 14 – 06 – 2022

Menyetujui,

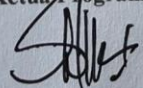
Pembimbing I


Marten Nusi, S.IP., M.AP
NIDN: 0901038502

Pembimbing II


Deliana Vitasari Djakaria, S.IP., M.IP
NIDN:

Mengetahui
Ketua Program Studi,


Darmawaty Abd. Razak., S.IP., M.AP
NIDN: 0924076701

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PERANAN KEPALA KELURAHAN DALAM
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN IPILO KECAMATAN KOTA TIMUR
KOTA GORONTALO**

Oleh :

NOVITA DJAFAR

S2118027

SKRIPSI

Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 14 - 06 - 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Tim Pembimbing dan Penguji :

- | | |
|---|---------|
| 1. Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP | (.....) |
| 2. Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si | (.....) |
| 3. Sandi Prahara, ST., M.Si | (.....) |
| 4. Marten Nusi, S.IP., M.AP | (.....) |
| 5. Deliana Vitasari Djakaria, S.IP., M.IP | (.....) |

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN : 091308602

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dengan ini menyatakan bahwa :

- 1 Skripsi ini adalah asli murni tulisan saya yang merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri
- 2 Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dan belum pernah dipublikasikan
- 3 Isi skripsi ini tidak terdapat gagasan maupun tulisan orang lain kecuali yang dicantumkan namanya.
- 4 Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini , saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Ihsan Gorontalo

Demikian pernyataan ini saya buat.

Gorontalo, 14 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



NOVITA DJAFAR
NIM S.21.18.027

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat-Nya dan telah melindungi penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan Judul:

“Analisis peran kepala kelurahan dalam program pemberdayaan masyarakat di kelurahan Ipilokecamatan kotatimurkota Gorontalo”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan karena keterbatasan pengetahuan dan literatur yang penulis miliki, namun berkat bimbingan serta bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak maka penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kepada Orang Tua tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan dengan segala daya dan upaya mendidik dengan penuh sabar dan ikhlas yang dibarengi dengan doa kepada Illahirabbi sehingga penulis dengan penuh syukur dapat membuktikan bahwa pengorbanan yang beliau berikan tidaklah sia-sia. Semoga cinta, motivasi dan spirit jiwa yang diberikan

mendapat ganjaran dari Allah SWT sebagai amanah jariah. Semoga karya ini menjadi kado yang mampu mengukir senyum manis di wajah Ayah Alm (Novri Abas) dan Ibu (Suryati Djafar)

2. Untuk anak-anak tercinta Azka Alvaro dan Aldric Kenzie yang selalu jadi penyemangatku.
3. Untuk ciciku (Yurni Djafar) yang selalu membantu dan merawatku.
4. Untuk sahabat-sahabatku yang selalu menuntun, membimbing serta memberikan hiburan dan kekuatan bagiku disaat suka dan duka dan selalu menemani perkuliahan ini
5. Terima kasih juga untuk dosen-dosen yang sudah mengajarkan arti perjuangan dalam menuntut ilmu.
6. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan di lingkungan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak, selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Gorontalo, 14 Juni 2022

NOVITA DJFAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 RumusanMasalah.....	6
1.3 TujuanPenelitian	6
1.4 ManfaatPenelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 PengertianPeranan.....	8
2.2 Peran PemimpinPemerintahan.....	10
2.3 Pemberdayaan Masyarakat	13
2.4 KerangkaPikir	18
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	20
3.1 ObjekPenelitian.....	20
3.2JenisPenelitian	20
3.3 FokusPenelitian	21
3.4 Lokasi Penelitian.....	21
3.5 InformanPenelitian	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.6.1 Wawancara.....	23
3.6.2 Obserfasi.....	23
3.6.3 Dokumentasi.....	23
3.7 Teknik Analisi Data.....	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
4.2 Hasil Penelitian	26
4.2.1 Pesan Antara Pribadi	26
4.2.2 Peran Penyambung Informasi	31
4.2.3 Peran Pengambil Keputusan	35
4.3 Pembahasan	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	42
5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	45

ABSTRAK

**Novita Djafar, NIM. S.21.18.027,
Analisis Peranan Kepala Kelurahan Dalam Program Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota
Gorontalo.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepala Kelurahan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah Analisis interaktif data yang saling berinteraksi. Adapun hasil penelitian peran Kepala Kelurahan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ipilo secara umum jika diukur melalui tiga indikator dari teori atau konsep peran, maka terlihat Kepala Kelurahan telah menjalankannya dengan cukup baik. Peran sebagai penghubung atau membangun hubungan secara struktural dan sosial dengan lingkungan Kelurahan telah berjalan sesuai dengan apa yang menjadikan esensi dari peran personal Kepala Kelurahan. Mulai dari peran antar pribadi, peran penyampaian informasi, sampai dengan peran pengambilan keputusan. Program pemberdayaan yang dilaksanakan di Kelurahan Ipilo dalam temuan penelitian telah membawa dampak pada kepentingan masyarakat sekitar. System transformasi kebijakan perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan system. Saran dalam penelitian ini peneliti fokuskan pada beberapa objek, yaitu pemerintah Kelurahan Ipilo, khususnya Kepala Kelurahan untuk dapat teruskan berkomitmen dalam menjalankan perannya dalam setiap program yang dicanangkan untuk mewujudkan keberhasilan tujuan program. Dorongan aparat Kelurahan setempat juga harus teruskan kepada pemimpinnya melalui motivasi atau komunikasi persuasif sehingga mampu meningkatkan kepemimpinan personal dan kelembagaan yang akan berdampak pada penilaian yang baik dan maksimal dari pemerintah di atasnya dan masyarakat yang dipimpinnya.

Kata Kunci : Peran Kepala Kelurahan, Pemberdayaa

ABSTRACT**NOVITA DJAFAR. S2118027. THE ANALYSIS OF THE ROLE OF THE URBAN VILLAGE HEAD IN THE COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM AT IPILO IN THE KOTA TIMUR SUBDISTRICT OF GORONTALO CITY**

This study aims to find and analyze the role of the urban village head in the community empowerment program at Ipilo, Kota Timur Subdistrict of Gorontalo City. This study employs a qualitative method. The data collection technique covers interviews, observation, and documentation. The data analysis technique is interactive analysis. The results of the study on the role of the urban village head in the community empowerment programs at Ipilo, in general, are measured through three indicators of the theory or concept of the role. The urban village head has implemented it quite well. The role as a liaison or building a structural and social relationship with the urban village environment has been running under the basic concept of the personal role of the urban village head. The forms are the role of individuals, the role of conveying information, and the role of decision-makers. The empowerment program carried out at the Ipilo urban village head has impacted the interests of the surrounding community. The policy transformation system requires improvement. The suggestions in this study focus on several objects, namely the Ipilo urban village government, especially the urban village head can continue to commit to carrying out their roles in every program proclaimed to realize the success of the program's goals. The encouragement of the local urban village apparatus must also continue to exist in their leadership through motivation or persuasive communication to improve personal and institutional leadership. It will have an impact on a good and maximum assessment of the government and the community the urban village head leads.

Keywords: the role of the urban village head, community empowerment

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam arti luas pada hakikatnya adalah seluruh elemen pendukung yang berbentuk lembaga atau organisasi dengan asas ideologi negara sebagai pegangan dalam menjalankan aktifitas pemerintahan.

Olehnya dalam mendefinisikan pemerintah dalam arti luas, maka dapat dikatakan bahwa setiap instansi atau lembaga yang berada dalam lingkup pemerintah dapat disebut sebagai pemerintahan.

Sebagai contoh adalah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ketiga lembaga negara tersebut adalah bagian penting dari tercapainya tujuan bernegara, khususnya dalam peningkatan hidup masyarakat.

Konsep kelembagaan di Indonesia telah jelas diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya yang memberikan penegasan tentang kedudukan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian, serta kualitas hidup masyarakat dalam berbagai program atau kebijakan yang dicanangkan. Sebagaimana undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memuat tentang bagaimana kedudukan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya secara mandiri, serta tepat guna dalam memanfaatkan fasilitas daerah yang ada, baik yang

menyangkut sumberdaya manusianya, sumberdaya alam, serta sarana penunjang lainnya, guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Konsep otonomi daerah memiliki arah yang jelas tentang peran dari masing-masing lembaga pemerintah dalam rangka mencapai harapan, serta tujuan dari program peningkatan kualitas hidup masyarakat, termaksud di dalamnya adalah dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam hal pengelolaan daerah melalui kebijakan-kebijakannya yang dapat mendorong percepatan pembangunan daerah, melalui pelibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan.

Pada dasarnya pembangunan adalah upaya menuju arah perubahan yang dilaksanakan secara terencana dengan beberapa proses pembangunan yang tujuannya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan di era saat ini yang sejalan dengan amanah undang-undang otonomi daerah telah mempertegasakan peran serta masyarakat pada semua jenis kegiatan pembangunan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif, mulai dari tahap perencanaan, sampai pada tingkat pelaksanaan kebijakan.

Paradigma pembangunan dengan pelibatan masyarakat di dalamnya adalah konsep terkini yang mampu mendorong dan mempercepat pembangunan di suatu daerah,

dalamrangkamewujudkanpemberdayaan, kesejahteraan dan kemandirianmasyarakat. Namunhal yang tidakbolehterlupakanadalah proses pembangunantersebutadalahpelibatansecarapartisipatif dan menyeluruhdariunsurpengambilkebijakan.

Unsurpengambilkebijakantersebutadalahpemerintah, baik pada level pusat, daerah, sampai pada tingkatkelurahanatauKelurahan.

Konseppembangunandalambentukpemberdayaanmasyarakatadalah model lain daripemenuhankebutuhanmasyarakatdengantujuanbahwamasyarakatdapat memilikikapasitasuntukmenentukanarahkehidupannyasecaramandirimelalui program kongkritdaripemberdayaan. Hal inimengimngatbahwamasyarakatlah yang menjadipelakudalampembangunan.

Pada tingkatanpemerintahan yang paling dibawah, yaituKelurahanatauKelurahanmemilikitanggungjawabsepenuhnyadalampayauntukmeningkatkankemadiriannasyarakatmelalui program pemberdayaan. Mengapademikian, karenapemerintahkelurahanlah yang menjadiujungtombakkeberhasilandalampembangunan Nasional. PemerintahkelurahanatauKelurahanlah yang menjadipenerjemah program pemerintahpusatdengantetapperpedoman pada ketentuan yang ada.

Dalamundang-undangpemerintahandaerah No. 23 Tahun 2014 telahtegasmenyebutkanperanpemerintahkelurahan, dimanadalamhaliniadalahLurah. Pada

prinsipnya Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan kelurahan, menyelenggarakan pembangunan, melaksanakan pembinaan, mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, serta melaksanakan pemberdayaan pada masyarakat.

Kelurahan sebagai penggerak program pemerintah pusat, serta institusi pemerintahan lokal yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat haruslah memiliki komitmen yang jelas, serta konsisten terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang merupakan tuntutan masyarakat, yang diterima baik secara langsung, maupun tidak langsung dan meneruskannya kembali kepada pihak di atasnya untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Melihat betapa besarnya tanggung jawab dari pemerintah kelurahan, dalam hal ini Lurah sebagai penanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan, maka sudah sepantasnya hal-hal yang menjadi kendala, serta permasalahan yang ada di masyarakat harus diselesaikan secara baik.

Fenomena umum yang berkembang bahwa program-program pemberdayaan pada tingkat pelaksanaan di lapangan masing-masing kurang mendapatkan perhatian secara baik dari pemerintah. Banyak masyarakat yang kurang mendapat sentuhan program pemberdayaan secara langsung dari pemerintah Kelurahan, program yang terkesantebang pilih, serta tidak tepat sasaran menjadi fenomena umum tentang lemahnya peran Lurah

dalam menjalankan fungsinya. Peranan Lurah yang diharapkan menjadi optimal dalam pencapaian tujuan pembangunan masih belum sesuai harapan.

Program pemberdayaan adalah satudiantara program pembangunan pemerintah yang mutlak mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah kelurahan, terkhusus Lurah sebagai pemimpin di Kelurahan tersebut. Ketersediaan sarana penunjang yang memadai belum dapat terpenuhi. Faktor kelancaran komunikasi antara Lurah dengan masyarakat dan juga pihak di atasnya masih menjadi permasalahan tersendiri dalam tercapainya tujuan pemberdayaan.

Fenomena umum tersebut juga sebagaimana terjadi pada pemerintah Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Terdapat beberapa pelaksanaan program pemberdayaan yang kurang mendapat dukungan penuh dari Lurah.

Dukungan berupa libatan langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, peningkatan kualitas sumber daya manusia berupa pelatihan bagi kelompok masyarakat masih terlihat belum maksimal dilakukan pendampingan, serta belum menjadi fokus dari pemerintah kelurahan.

Program pemberdayaan pada tingkat Kelurahan di Kota Gorontalo secara umum sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah di fokuskan pada beberapa bentuk kegiatan, diantaranya adalah pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada

masyarakat yang bergerak di bidang usaha tertentu, bentuk sosialisasi tentang kesadaran hukum, pendampingan pada usaha kecil masyarakat, serta beberapa bentuk kegiatan lainnya.

Namun dalam pelaksanaannya, penulis mengamati bahwa program tersebut belum terlaksana dengan baik, padahal telah didukung oleh dana kelurahan yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Secara faktual keterlibatan Lurah dalam memberikan arahan, pendampingan, serta pelayanan persuasif dan kelompok belum sepenuhnya dilakukan. Responsifitas dan kemampuan aparatur pemerintah menjadi salah satu indikator penentu dalam pencapaian tujuan dari suatu program.

Melihat beberapa fenomena yang dijelaskan pada uraian sebelumnya,

makapenulistertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “

Analisis Peranan Kepala Kelurahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang yang ada, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini untuk menjawab fenomena empirik yang ditemukan dan dikaji lebih jauh, serta dianalisis. Adapun rumusan masalahnya adalah :

Bagaimanakah peran Lurah dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis peran Lurah dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara akademis

Diharapkan penelitian ini nantinya akan menjadi bagian pelengkap dari perkembangan ilmu pengetahuan,

khususnya dalam hal peningkatan literasi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dalam fokus kajian yang sama.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini penulis berharap akan menjadi referensi bagi pemerintah

Daerah Kota Gorontalo,

khususnya pemerintah Kelurahan Ipi dalam menjalankan program pemberdayaan,

serta sebagai rujukan bagi Lurah setempat dalam menjalankan perannya sebagai unsur yang bertanggung jawab pada jalannya proses pembangunan di Kelurahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Menurut Rivai (2010) peran adalah seseorang yang diharapkan bisa membawa yang menuju kepada kemajuan, walau hasil akhirnya tidak seperti yang menjadi tujuan.

Miftah Thoha (2012, hal. 10) mengatakan bahwa "Peranan perilaku mengikuti jabatan atau posisi dalam sebuah organisasi.

Senada dengan Arifin, (2012: hal.

11) "mengelompokkan peran manajer ke dalam 3 peran, yakni:

- 1) Peran jembatan antar pribadi (*Interpersonal Roles*), meliputi peranan-peranan yang melibatkan hubungan dengan orang lain (para bawahan dan orang-orang di luar organisasi) dan aktivitas lainnya yang bersifat testimonial dan simbolis.
- 2) Peran penyambung informasi (*Informational Roles*), meliputi aktivitas-aktivitas pengumpulan, penerimaan, dan penyampaian informasi. Di sini manajer berperansebagai pengawas, penyebar berita, dan jurubicara.
- 3) Peran pengambil keputusan, mencakup hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan dan penentuan pilihan. Dalam kategori ini manajer dapat berperansebagai pengusaha (*inisiator, enterprenuer*), pengentaskendala, pengalokasi sumber daya, dan perunding.

Menurut Soejono Soekanto (2012, hal. 213)

“peranan mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-

norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang

membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Norma-

norma tersebut secara sosial dikenal ada empat meliputi :

- a) Cara (*Usage*); lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya dapat mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar cela dari individu yang dihubungkan.
- b) Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
- c) Tata kelakuan (*mores*), merupakan cermin sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
- d) Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi *ustom* atau adat istiadat.”

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri-ciri dan bawah yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Menurut Siswanto, (2012 hal. 76)

“Ada 4 ciri utama individu, yaitu:

1. Persepsi (*perception*) adalah persepsi pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.
2. Sikap (*attitude*) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya.
3. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan.
4. Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek.”

2.2 Peran Pemimpin Pemerintahan

Sebagai dasar dalam membicarakan peran pemerintah, terlebih dahulu untuk membahas tentang fungsi pemerintah sendiri, dalam hal ini pemerintah lokal. Adapun fungsi dari pemerintah menurut UU Nomor 32 tahun 2004 yaitu:

- a. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat, dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
- d. Dalam menjalankan fungsinya Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri dalam berbagai urusan kecuali urusan pertahanan keamanan, moneter, kehakiman, hubungan luar negeri, dan agama (Arsiyah).

Menurut Arifin (2012: hal. 114)

“dalam bukunya *Leadership* menyebutkan beberapa peran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu:

- 1) Sebagai penentu arah;
- 2) Sebagai wakil dan jurubicara organisasi;
- 3) Sebagai komunikator yang efektif;
- 4) Sebagai mediator; dan
- 5) Sebagai integrator”

Kaitannya dengan pembangunan, Tjokroamidjojo (2011, hal. 18) “memandang bahwa peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk: yakni sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, sebagai pelayan masyarakat, serta sebagai *enterpreneur*. Sebagai keamanan dan ketertiban merupakan peran pemerintah untuk menjaga kestabilan kondisi mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial- budaya. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah menampung aspirasi masyarakat, memfasilitasi keinginan, menjadi mediator antar berbagai kepentingan sehingga pembangunan berjalan dengan baik. Sebagai *enterpreneur*, pemerintah mendorong masyarakat untuk menemukan berbagai inovasi, selain itu pemerintah disini berperan sebagai agen pembaharuan dalam pembangunan.”

Sementara itu Siagian (2012, hal. 142) “menguraikan beberapa peran pemerintah dalam pembangunannya yaitu peran selaku stabilitator, peran selaku inovator, peran selaku modernisator, peran selaku pelopor, serta peran selaku pelaksana sendiri. Pembangunan akan efektif bila situasi politik, ekonomi, sosial- budaya serta pertahanan dan keamanan dalam kondisi yang stabil. Jika aspek- aspek tersebut dalam kondisi yang labil, maka pembangunan terhambat bahkan tidak berjalan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk menstabilkan kondisi tersebut.”

Adisasmita (2011, hal11) lebih mengerucutkan peran pemerintah Kelurahan dalam pembangunannya yaitu sebagai penyampaian pembangunan, pengarah masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Peran tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Berbagai program peningkatan kualitas hidup masyarakat telah dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memberdayakan kehidupan warganya. Upaya-upaya tersebut sebagai wujud konkrit dari percepatan pembangunan manusia utuhnya yang diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kapasitas, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Perwujudan dari program tersebut diaktualisasikan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat.

Saefullah, (2007, hal. 192) mengatakan bahwa “Pemberdayaan merupakan upaya manajemen untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas pegawai dari keadaan yang ada sekarang atau dari kurang berdaya menjadi lebih berdaya sehingga pegawai semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Saefullah mengatakan bahwa ”semakin berdaya atau semakin memiliki kekuatan aparaturnya maka akan mening

katkan kemampuannya untuk menciptakan sikap profesionalisme dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya.”

Secara konseptual, Edi Suharto, (2015, hal. 57) “Pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.”

Pemberdayaan menurut Suhendra, (2006, hal. 74) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.”

Menurut Moh. Ali Aziz (2005, Hal. 169) “pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan penguasaan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antara subjek dengan subjek lain.”

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu wujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

- a. Membantu pengembangan manusia yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum mudapencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Secara lebih rinci Slamet (2003:49) menekankan bahwa hakikat Pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.

Indikator pemberdayaan menurut Soeharto (2011:50) paling tidak memiliki empat hal yaitu:

1. Kegiatan yang terencana dan kolektif.
2. Memperbaiki kehidupan masyarakat.
3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan
4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Ambar Teguh Sulistiyani (2004, hal. 82) “Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif merupakan pemahaman terhadap sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.”

Terdapat lima kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat:

1). Motivasi

Anggota masyarakat dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Masyarakat perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di Kelurahan atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

2). Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

3). Manajemen diri

Kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat me-

mbantumerekadalammengembangkansebuahsistem.Kelompokkemudiandapatdi beriwewenangpenuhuntukmelaksanakandan mengatur sistem tersebut.

4).Mobilisasi sumber

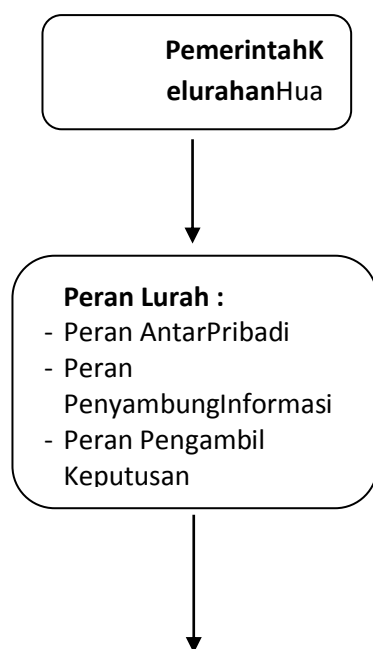
Merupakansebuahmetodeuntukmenghimpunsumber-sumberindividual melaluitabunganregulerdan sumbangansukareladengantujuanmenciptakanmodalsosial.Ide inididasaripandanganbahwasetiaporang memilikisumbernyasendiri yang,jikadihimpun, dapatmeningkatkankehidupansosialekonomisecarastansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaansumberperludilakukansecaracermatsehinggasesuaanggotamemiliki kesempatan yang sama.Halini dapatmenjaminkepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.¹⁰

5).Pembangunan dan pengembangan jaringan

Pengorganisasian kelompok-kelompokswadaya masyarakat perludisertaidenganpeningkatankemampuanpara anggotanyamembangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya.Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

2.4 Kerangka Pikir

Tanggungjawabakanpeningkatanhidupmasyarakattelahmenjadibeb
anpemerintahsebagaimana yang telahdijaminakandalamundang-
undangtentangtugas dan fungsipemerintahsebagaiunsur negara yang
berkepentinganlangsungdalam pembangunan manusia. Program
pemberdayaan masyarakat yang
selamainidicanangkanselamainisecara umum telah mampumemberikan kont
ribusi aktif pada
pemenuhankebutuhandasarmasyarakat, baik dari sisi peningkatan ekonomi,
maupun pada kemandirian masyarakat. Pemerintah huan goboto salah
atu unsur pemerintah kelurahan di Kota Gorontalo yang
turutsertamenjalankan program pemberdayaan sebagai penjabar dari
program pemerintah Kota Gorontalo melalui dana
kelurahan dengan menyasar beberapa sektor kegiatan,
sepeerti halnya pelatihan, pembekalan kerja, serta bentuk dukasi lainnya.
Pemberdayaan dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan pemerintah melalui
program-program yang berorientasi pada
peningkatan kehidupan masyarakat,
sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, serta penjelasan dari kerangka pikir, maka yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.

3.2 Jenis Penelitian

Pada umumnya penelitian yang bersifat naratif menekankan pada aspek penalaran mendalam dengan tujuan agar dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dari obyek yang sedang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka jenis penelitian dalam usulan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, melalui pendekatan kualitatif. Lexy Maleong (2014, hal. 4) “menjelaskan bahwa

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif/gambar dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Lexy Moleong (2014: 4), jenis penelitian kualitatif adalah sebagai model penelitian yang dapat menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan penelitian, serta perilaku dari objek yang diamati selama penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Selain menekankan pada hasil yang bersifat holistik, penelitian kualitatif juga menekankan pada kejelasan fokus penelitian yang menjadikan titik penting untuk dijadikan bahasan yang relevan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Fokus akan menentukan batasan-batasan dari peneliti tentang apa yang akan dikaji dan diteliti lebih jauh, serta memungkinkan penulis untuk tetap terarah pada objek kajian pada saat pengumpulan data dan analisis data.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

Peran Lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ipilo yang dikaji pada beberapa hal, yaitu :

- a. Peran antar pribadi
- b. Peran penyambung informasi
- c. Peran pengambil keputusan

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjelaskan tentang di mana penulis melakukan penelitian atau di mana penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu yang menjadi lokasi atau lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian tersebut tidak lepas dari pertimbangan awal tentang permasalahan yang penulis dapatkan, kemudahan penulis dalam proses pengumpulan data nanti di lapangan.

3.5 Informan Penelitian

Penentuan informan penelitian tidak berdasarkan pada keinginan semata dari penulis, namun mempertimbangkan faktor keterkaitan dengan orang yang dianggap mengetahui pokok kajian yang sedang dilakukan, dengan Teknik purposive sampling, sehingga memudahkan perolehan informasi secara jelas dan dapat memudahkan penulis dalam pengumpulan informasi pada beberapa sumber berikutnya. Olehnya yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Lurah Ipilo
- 2) Sekretaris Lurah
- 3) Kaur pemerintahan
- 4) LPM
- 5) Perkwilantokoh masyarakat

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya : wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penjelas dari ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai mana dibawah ini :

3.6.1 Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk menjangkau data dan informasi kualitatif secara langsung dari sumber data. wawancara dilakukan secara terbuka dengan tujuan agar peneliti dapat dengan leluasa mengembangkan pertanyaan yang muncul.

3.6.2 Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian melalui panca indra ini untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

3.6.3 Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengkaji data sekunder, kemudian mengumpulkannya, mencatat ataupun mempelajari dokumen-dokumen / arsip-arsip yang ada, yang terkait dengan penelitian. sehingga dapat diketahui permasalahan yang terjadi atas dasar referensi buku maupun naskah yang ada.

3.7 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2005) bahwa penelitian kualitatif proses analisis data yang mengedepankan analisis deskriptif, dengan beberapa tahapan, yaitu

1. Reduksi data

Reduksi data adalah memilah-milah data yang dikumpulkan, membuang data yang tidak dibutuhkan dan mengambil data yang berhubungan dengan penelitian. Dan apabila data yang dikumpulkan dianggap belum valid, proses ini dilakukan berulang kali sampai data yang dikumpulkan dianggap valid.

2. Penyajian data

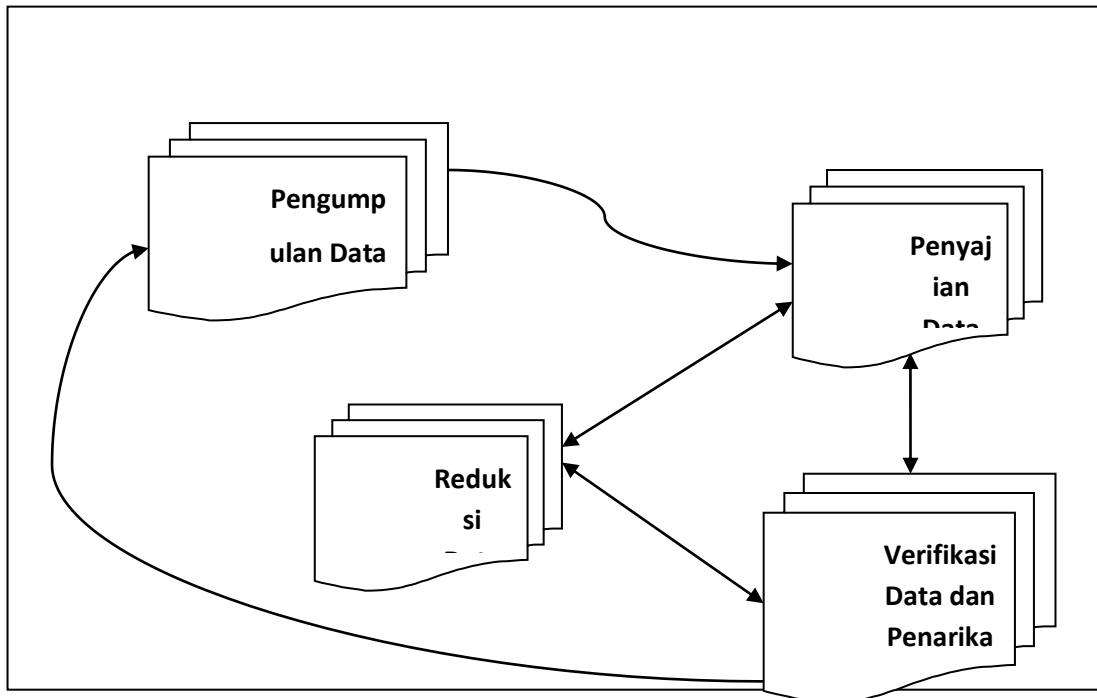
Penyajian data yaitu, data yang telah melalui proses reduksi data disajikan sebagai hasil penelitian.

Selanjutnya dapat dilanjutkan untuk menarik kesimpulan penelitian.

3. Menarik kesimpulan.

Menarik kesimpulan dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianggap valid sudah melalui konfirmasi kebenaran data. Disajikan dalam bahasa yang singkat dan jelas. Tiga jenis kegiatan analisis dan

kegiatan pengumpulan data merupakan suatu proses siklus dan interaktif, dapat dilihat gambar berikut ini :



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Ipilo merupakan satu di antara Kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Berdasarkan nama kayutipilo, dimana kayutipilo tersebut berasal dari pohon yang tumbuh banyak dan keadaannya di wilayah Kelurahan Ipilo.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Antara Pribadi

Pelibatan pemimpin lokal dalam mendukung dan menjalankan fungsi kekuasaan dalam institusinya adalah suatu keharusan yang penting dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Mengingat bahwa peran dan kedudukan pemimpin, maka dapat dipastikan bahwa organisasi atau institusi tersebut tidak akan berjalan dengan baik, lebih lagi tujuan organisasi tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Hal yang sama juga penting untuk dilakukan pada pemerintah Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Peran Kepala Kelurahan dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan adalah hal yang perlu diusahakan dan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, sehingga berdampak pada peningkatan hidup masyarakat yang ada di Kelurahan tersebut.

Peran antarapribadi dipahami adalah bagian dari proses pelibatan kepemimpinan Kepala Kelurahan dalam upaya membangun hubungan antarapemimpin dan bawah dalam organisasi pemerintahan, serta pihak luar sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap kebijakan atau program yang diambil. Peran antarapribadi menempatkan kepemimpinan menjadi simbol dan atau ukuran penilaian terhadap eksistensi organisasi dari pihak manapun, sehingga dukungan dan dorongan untuk pencapaian tujuan dari kebijakan dapat terwujud.

Hasil penelitian berupa wawancara yang peneliti temukan di lapangan berkaitan dengan peran antarapribadi Kepala Kelurahan Ipil dalam program pemberdayaan. Diantara hasil wawancara tersebut yaitu :

Hasil wawancara bersama Lurah Ipil bahwasanya :

“Saya secara pribadi selama ini dalam kepemimpinan saya, selalu mengedepankan prinsip komunikasi yang baik dengan semua pihak, baik masyarakat, maupun aparat Kelurahan. Dalam hal-hal yang menyangkut kebijakan pembangunan ataupun pemberdayaan selama ini memang telah kami laksanakan dengan baik. Banyak program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kelurahan ini”. (Wawancara, April 2022).

Peneliti kemudian melanjutkan pertanyaan seputar tugas dan tanggung jawab Lurah yang menjelaskan :

“Secara normatif tugas yang kami pahami adalah pemerintah Kelurahan melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat Kelurahan, dan pemberdayaan terhadap masyarakat Kelurahan Ipilo dan itu menurut kami telah kami lakukan. Kami sadar protes dan kritik dari masyarakat itu pasti ada dan itu menjadi bahan evaluasi kami untuk menjadi lebih baik” (Wawancara, April 2022).

Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Sekretaris Kelurahan Ipilo yang mengatakan bahwa :

“ Bapak Lurah ini orangnya cukup mudah berinteraksi dengan siapa pun, baik itu bawahannya, maupun masyarakat secara umum. Saya melihat beliau cukup dihargai oleh masyarakat di Kelurahan ini dikarenakan selalumengedepankan keinginan masyarakat. Berkaitan dengan program pemberdayaan yang ada di Kelurahan ini, kepemimpinan Lurah telah mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk mendukung program tersebut berjalan dengan baik.” (Wawancara, April 2022).

Hal senada disampaikan oleh salah satu pegawai yang ada di Kelurahan Ipilo tentang peran antar pribadi Kepala Kelurahan dalam program pemberdayaan :

“SepengetahuansayaLurahselamainiteahmemainkanperan yang cukupbaikdalammelaksanakan program pemberdayaan di Kelurahanini. Pak Lurahmenjadipenghubungantarapihakpemerintahdaerahdalamhalini Dinas terkait, maupunmasyarakat.” (Wawancara April 2022).

Penelitimemperkuathasilwawancarasebelumnyasebagaimanadiatas denganmewawancaraiKetua LPM KelurahanIpilotentangperanantarapribadiLurah, yang menjelaskanbahwa :
 “Kami sebagaimitraperintahKelurahanIpilomenilaibahwakepemimpinanLurahi nitelahmembawaperubahancukupbaikbagimasyarakatsetempat. Bapak Lurahmampumenjadisimboleksisintensidarilembagapemerintahan yang mampumenumbuhkensemangat, sertaperubahanbagimasyarakatnya. Bapak Lurahinicukup familiar, beliaucukupdikenal dan mampumembawapengaruhbaikmasyarakat” (Wawancara, April 2022).

Senadadenganinforman-informansebelumnyapenelitikemudianmelakukanwawancaradengan salah satutokohmasyarakatKelurahanIpilodenganpertanyaan yang sama. Hasil wawancaratersebutmenyebutkanbahwa :
 “Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintahKelurahanselamainicukupdapatdirasakan oleh masyarakat. Mulaidari program UKM, program pelatihan dan penyuluhan dan lainnya. Saya sebagaiwarga juga turutmerasakanitu. Kami

menilai tidak terlepas dari peran penting bapak Lurah yang selama ini telah memperjuangkan melalui Dinas terkait, maupun kepada Bapak Walikota. Peran beliau sangat dirasakan, namun kami juga berharap agar kedepan jauh lebih baik lagi, khususnya dalam pemerataan program”. (Hasil wawancara April 2022).

Unsur masyarakat lainnya yang diwawancarai oleh peneliti terkait dengan Peran Kepala Kelurahan dalam program pemberdayaan juga menyebutkan bahwa:

“Saya secara pribadi menilai bahwa Bapak Lurah ini sudah bagus, artinya secara keseluruhan sudah memberikan perubahan, namun kalau bisa memberikan saran, saya hanya memintakan bahwa Pak Lurah harus bisa berbuat adil pada pembagian dan pemanfaatan program-program pemberdayaan. Misalnya bagi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan alat per bengkelan, maupun pinjaman modal untuk usaha kecil menengah. Terdapat beberapa masyarakat yang menilai bahwa program ini tidak tepat sasaran dan risikonya kelayakan penerima” (Wawancara April 2022).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara bersama para informan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan Kepala Kelurahan Ipi Ipi dalam menjalankan peran antar pribadi secara umum telah berjalan dengan baik.

Artinya dalam hal di mana hubungan antar kepemimpinan Kepala Kelurahan dan

laksanakan program pemberdayaan di Kelurahan Ipil bersama masyarakat, serta pihak luar baik pemerintah daerah Kota Gorontalo, maupun pihak lain yang berpenting dengan program pemberdayaan telah berjalan dengan baik.

Kepala Kelurahan Ipil telah menjadi simbol akan eksistensi kepemimpinan pemerintah Kelurahan melalui langkah-langkah konkrit yang dilakukan selama ini. Dilihat dari temuan penelitian yang ada, maka terdapat hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Kelurahan berkaitan dengan kebijakan pemerataan tentang objek penerima program, sebagaimana yang terungkap dengan masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti.

4.2.2 Peran Penyambung Informasi

Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan adalah bagaimana pelayanan kebijakan dengan kepentingan masyarakat yang menjadi objek pelaksanaan kebijakan. Hal ini dimaksudkan bahwa orientasi penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan diarahkan pada kepentingan peningkatan kehidupan masyarakat di wilayahnya, baik dalam lingkup pusat, daerah, sampai pada tingkat Kelurahan.

Olehnya sebagai perwujudan tersebut dibutuhkan seorang pemimpin pemerintahan yang mampu secara kapabilitas menerjemahkan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang

kemudiandiwujudkankedalambentukkebijakan formal dan informal sehingga berimplikasi pada kepentingan masyarakat luas.

Seorang pemimpin pada tingkat pemerintah kecil, seperti Kepala Kelurahan membutuhkan kecakapan dalam membangun komunikasi yang baik, guna menghubungkan tujuan kebijakan atau program yang ingin dilaksanakan.

Maka dalam konteks itu peran penyambung informasi seorang Kepala Kelurahan sangat diperlukan dalam rangka memastikan informasi dapat tersampaikan secara komprehensif kepada masyarakat.

Peran penyambung informasi seorang pemimpin sangat diperlukan dalam menjadi mediator terhadap seluruh kebijakan pemberdayaan yang ada dan kemudiandi salurkan melalui informasi yang tepat kepada masyarakat dan juga polahubungankomunikasiantaramasyarakat dengan pihak luar lainnya yang juga turut mendukung kebijakan pemberdayaan.

Dalam kaitannya dengan deskripsi di atas tentang peran Kepala Kelurahan sebagai penyambung informasi, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui peran Kepala Kelurahan Ipilo sebagai penyambung informasi, khususnya berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat Kelurahan Ipilo.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan tentang peran Kepala Kelurahan Ipilo terhadap program pemberdayaan masyarakat, diperoleh sebagai berikut :

Hasil penelitian peneliti bersama sekretaris Kelurahan Ipilo yang diwawancarai tentang peran Kepala Kelurahan dalam menjalankan peran antar pribadi yang menyebutkan bahwa :

“Bapak

Lurah selama ini sudah menjalankan prinsip kepemimpinan yang melalui peran dalam menyampaikan informasi dan membangun komunikasi dengan baik pada semua lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan ini. Setiap kebijakan pemberdayaan selama ini sudah disampaikan oleh pemerintah Kelurahan dalam hal ini Kepala Kelurahan dan terlihat memang masyarakat memberikan respon yang baik”. (Wawancara, April 2022)

Hasil wawancara lainnya yang peneliti temukan bersama Kepala Kelurahan Ipilo sebagai informan pembading bagi peneliti dengan pertanyaan yang sama, yaitu mengenai perannya dalam program pemberdayaan di Kelurahan Ipilo. Dalam wawancara tersebut Bapak Kepala Lurah Ipilo menyampaikan bahwa :

“Saya pada dasarnya tidak mau menilai pribadi dan kinerja saya sendiri, karena yang menilainya adalah masyarakat dan pemerintah di atas saya. Namun dalam menjalankan peran sebagai pemimpin di Kelurahan ini,

sayatentu harus melaksanakan tanggung jawab saya untuk memastikan seluruh program yang dicanangkan harus dilaksanakan dengan baik. Olehnya sebagai Lurah saya selalu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat guna menyampaikan informasi-informasi penting berkaitan dengan program pemberdayaan”. (Wawancara, April 2022).

Sejalan dengan apa yang disampaikan dengan informan sebelumnya, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan salah satu anggota LPM Kelurahan Ipilo tentang pandangan LPM terkait dengan peran Lurah Ipilo dalam menjalankan peran penyambung informasi yang mengatakan :

“Saya sendiri sebagai Mitra Kelurahan di Kelurahan Ipilo yang merupakan bagian dari pemerintahan Kelurahan, khususnya dalam kaitannya dengan program-program pemberdayaan melihat bahwa Lurah Ipilo selama ini sudah aktif dalam membangun komunikasi dengan baik dengan semua elemen, baik masyarakat yang ada di Kelurahan ini, kami di LPM, serta pihak luar yang berkepentingan dengan program pemberdayaan” (Wawancara, April 2022).

Pada kesempatan selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di Kelurahan Ipilo, diperoleh pernyataan dari informan sebagai berikut :

“Selama ini dalam penilaian saya Bapak
Lurah Ipilo memang selalu berkomunikasi dengan baik bersama masyarakat.
Segala kebijakan yang dibuat selalu dilakukan sosialisasi melalui forum-forum
musyawarah, baik dari tingkat lingkungan, maupun musyawarah di
Kelurahan Ipilo. Program-program yang
selama ini dilaksanakan sudah cukup memberikan rasa kepuasan pada
masyarakat. Hanya saja perlu di perbaiki system informasi berupa model
penyaluran dan penerima program pemberdayaan. Dimana
saya sendiri melihat masih kurang transparan informasi yang dilakukan,
masyarakat bertanya-tanya tentang ketepatan program di masyarakat”.

(Wawancara, April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan-informan sebagaimana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Kelurahan Ipilose sebagai penyambung informasi terhadap program-program pemerintah Kelurahan, khususnya berkaitan dengan program pemberdayaan telah terwujud dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Kelurahan Ipilose mampu menjadi mediator terhadap kebijakan yang diambil dan mampu menjadi penghubung informasi kepada masyarakat, sehingga menimbulkan persepsi yang baik kepada masyarakat. Sekalipun terdapat pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa diperlukan model komunikasi yang lebih transparan kepada masyarakat, sehingga tidak menyebabkan permasalahan baru dan menyebabkan tujuan program tidak tercapai.

4.2.3 Peran Pengambil Keputusan

Legitimasi kepemimpinan seseorang dalam suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh sejauh mana seorang pemimpin tersebut dapat berperan penting dalam proses lahirnya suatu keputusan.

Arah kebijakan suatu institusi memang memerlukan pemimpin yang cepat dan tepat dalam mengambil keputusan sebagai usaha konkret untuk memberikanda

mpak bagi institusi yang dipimpinnya, serta orang-orang disekitarnya yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama.

Kepemimpinan Kepala Kelurahan Ipilo dalam upaya menasejahterakan masyarakatnya melalui kebijakan atau program pemberdayaan selama ini menurut beberapa informan yang diwawancarai oleh peneliti sudah sangat terlihat. Peran Kepala Kelurahan dalam proses pengambilan keputusan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat Ipilo selama ini sudah banyak terlihat melalui forum-forum musyawarah, serta model komunikasi lainnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan sebagaimana di bawah ini :

Hasil wawancara bersama anggota LPM Kelurahan Ipilo yang mengatakan bahwa :

“Dalam pengamatan kami selama ini Bapak Lurah Ipilo cukup responsive dan sangat konsen dalam program-program pemberdayaan, apalagi program pemberdayaan saat ini adalah bagian dari program pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Selama ini dalam forum-forum musyawarah, bapak Lurah memang terlihat sangat agresif dalam pengambilan keputusan. Artinya keterlibatan Kepala Kelurahan dalam pengambilan keputusan sangat terlihat. Bapak Lurah banyak memberikan arahan, masukserta gagasan-gagasan yang progresif sehingga lahir keputusan yang tepat” (Wawancara, April 2022).

Sejalan dengan pernyataan anggota LPM diatas, peneliti juga mewawancarai Sekretaris Kelurahan Ipilo berkaitan dengan peran Kepala Kelurahan dalam pengambilan keputusan, adapun pernyataannya adalah :

“Selama kami menjadisekretaris di Kelurahan Ipilo inipenilaian kami atasperannyadalampengambilankeputusanitu sangat baik. BpakLurahinimemangcukupaktifdalamsetiap proses pengambilankeputusan. Misalnyadirapat-rapat yang dilakukanbaik yang dilakukanbersama aparat, maupunmasyarakat, KepalaKelurahan sangat berperanuntukmembuatsatu keputusan yang tepatdalamrealisasi program” (Wawancara, April 2022)

Hasil wawancaralainnya yang penelitidapatkanbersamainformanlain, yaitu salah satumasyarakat di KelurahanIpiloadalah:

“Bapak LurahIpiloinimenurutsayabanyakmemberikansarah, masukanbahwabeliautegasdalam mengambilkeputusan. Misalnyauntuk program pemberdayaanbidangperkengkelan, sayasendirimelihatbeliauseringmenegaskan pada aparatnyauntukselalumemberikanpelayanan yang terbaik dan transparan pada program yang dilaksanakan.” (Wawancara , April 2022).

Pernyataanlainnyadiperoleh oleh peneliti melaluiwawancarabersamasatumasyarakatlainnyatentangperanKep

ala Kelurahan dalam pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ipilo, yang menyatakan :

“Bapak Lurah Ipilo ini orangnya cukup cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Saya menilai program pemberdayaan misal nya itu berjalan dengan cukup baik, sekalipun ada masyarakat lain yang mengajukan protes atau ketidakjelasan pembagian bantuan pada masyarakat. Namun saya harus adil menilai bahwa Lurah Ipilo sudah cukup banyak melibatkan diri dalam pengambilan keputusan pada program pemberdayaan”.

(Wawancara , April 2022).

Salah seorang aparat di Kelurahan Ipilo yang diwawancarai oleh peneliti menyebutkan bahwa :

“Setiap kegiatan rapat dan musyawarah tentang program pemberdayaan yang dilaksanakan di kantor Kelurahan, Bapak Lurah selalu hadir memimpin rapat dan memberikan banyak masukan berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan. Beliau dengan gagasannya selalu memberikan solusi jika terdapat kebuntuan dalam rapat” (Wawancara, April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan di atas tentang peran Kepala Kelurahan Ipilo dalam pengambilan keputusan, maka peneliti menyimpulkan bahwa, Kepala Kelurahan Ipilo dalam kepemimpinannya telah mampu memberikan peran sentral dalam proses lahirnya satu keputusan. Melalui beberapa forum

musyawarahataurapat yang dilaksanakan, KepalaKelurahantelahmampumemainkanperansebagaipengabilkeputusandalam proses yang ada, baikberupapenyampaian ide ataugagasan, sampai pada penegasanterkatsatubentukkeputusan yang diambil. Berkaitandengankeputusandalam program pemberdayaan, dalambeberapapernyataandisebutkanbahwaKepalaKelurahanIpilosecaraaktifterlibatdalam proses lahirnyasatukeputusanpenting yang dapatmeberikanimplikasi yang baik pada pelaksanaan program.

4.3 Pembahasan

Model kepemimpinanpemerintahansaatinidiarahkan pada upayapercepatanpembangunanseutuhnya yang berdampak pada kesejahteraanmasyarakat. Melalujajarandiabwahnyapemerintahdaerah Kota Gorontalo dalam pelaksanaanberbagaikebijakanpemberdayaanmasyarakatdifokuskan pada program-program konkritdenganpelibatanmasyarakatsecarautuh. Pelibatanmasyarakattersebutadalahmelalupemberian stimulus bantuan yang dikelolamasyarakatsendiri, misalnyamelalupemberianbantuan modal usaha, perbengkelan, pelatihan dan penyuluhan, sampai pada penyediaanlapangankerja yang dapatdikelolasecaralangsung oleh masyarakat.

Peran

pemerintahKelurahansebagaipenerjemahdarikebijakanpemerintah Daerah

harus secara maksimal untuk melaksanakan kebijakan tersebut di wilayahnya masing-masing, yang tanggung jawabnya diberikan kepada Kepala Kelurahan.

Melalui perantara Kepala Kelurahan berdasarkan pemaparan temuan penelitian yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya telah memberikan gambaran faktual bagaimana peran Kepala Kelurahan Ipilo yang dipotret pada tiga indikator peran, yaitu peran antar pribadi, peran penyampai informasi dan peran pengambil keputusan.

Ketiga indikator peran yang dijadikan fokus oleh peneliti dalam melihat hal-hal yang factual di lapangan menunjukkan bahwa peran Kepala Kelurahan dalam program pemberdayaan telah berjalan sebagaimana mestinya, data wawancara yang dipaparkan telah menunjukkan bahwa Kepala Kelurahan Ipilo dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan telah mampu mewujudkan pencapaian program yang dicanangkan dengan peran aktifnya.

Berkenaan dengan peran dalam inti organisasi dalam upaya mewujudkan kebijakan organisasi, Arifin (2012: hal. 11) telah memberikan konsep tentang peran yang ditekankan pada tiga aspek penting, yaitu peran antar pribadi yang menyangkut tentang bagaimana seseorang pemimpin mampu menjadi penghubung tentang konsep-konsep kebijakan yang diambil dengan selalu berhubungan internal dalam organisasinya,

maupundenganpihakeksternal. Hal
lainnyaadalahperanpenyampaiinformasi,
dimaskudnknbahwaperanseorangpemimpindalammenterjemahkankeingin
annya,
ataukeinginandarikebijakanintitusisecarakelmabagaankepadapihakluarmen
jadipentinguntukdilaksanakandengansecaratransparan dan maksimal.
Pempimpinharusmenjadi mediator
dalamsebagalainformasidalamrangkamembangunkominukasi yang baik
dan efektifdenganpihakluar,
khususnyamasyarakatketikahalitubersentuhdenganorganisasipemerintah
an. Hal
ketigaadalahberkaitandenganperanpengambilkeputusandalamhalkonteksini
seorangpemimpinorganisasiprivat,
maupunpemerintahanharusdapatterlibatsecaraaktifdalam proses
pengambilankeputusan yang dilaksanakan oleh institusinya. Dimana salah
satuindikatorkepemimpinan yang efektifitu salah satunya diukur oleh
sejauh mana seorangpemimpinmampumemainkanperanaktifdalam proses
lahirnyasatukeputusan yang
dapatmembawaperubahanbagilingkungansekitarnya.

Secarakeseluruhan, ketigaindikator yang dijelaskan oleh Arifin
(2012: hal. 11)diatasmenekankan pada keberhasilankepemimpinan personal
seseorang yang dapatmenjadi barometer
penilaikelembagaansecarakeseluruhan, baik yang

menyangkut tentang sumberdaya manusianya, maupun relisasi kebijakan yang telah diprogramkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diukur berdasarkan fakta temuan penelitian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kepala Kelurahan I pilot telah mampu memberikan dampak yang baik bagi peningkatan kehidupan masyarakat melalui keterlibatan peran Kepala Kelurahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang peran Kepala Kelurahan Ipi dalam program pemberdayaan masyarakat, maka terdapat kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah peran Kepala Kelurahan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ipi secara umum jika diukur melalui tiga indikator dari teori atau konsep peran, maka terlihat Kepala Kelurahan telah menjalankannya dengan cukup baik.

Peran sebagai penghubung atau membangun hubungan secara struktural dan sosial dengan lingkungan Kelurahan telah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi konsep dasar dari peran personal Kepala Kelurahan. Mulai dari peran antar pribadi, peran penyampai informasi, sampai dengan peran pengambil keputusan. Program pemberdayaan yang dilaksanakan di Kelurahan Ipi dalam temuan penelitian telah membawa dampak pada kepentingan masyarakat sekitar. Dalam temuan penelitian terungkap juga model komunikasi dalam kaitannya dengan teknis pelaksanaan program dinilai masyarakat belum berjalan dengan baik. System

transformasi kebijakan perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan system.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini peneliti fokuskan pada beberapa objek, yaitu pemerintah Kelurahan Ipilo, khususnya Kepala Kelurahan untuk dapat teruskan berkomitmen dalam menjalankan perannya dalam setiap program yang dicanangkan untuk mewujudkan keberhasilan tujuan program. Dorongan aparat Kelurahan setempat juga harus teruskan kepada pemimpinnya melalui motivasi atau komunikasi persuasif sehingga mampu meningkatkan kepemimpinan personal dan kelembagaan yang akan berdampak pada penilaian yang baik dan maksimal dari pemerintah di atasnya dan masyarakat yang dipimpinnya. Selanjutnya adalah pada mekanisme penetapan objek penerima program harus mengedepankan aspek pemerataan dan pemanfaatan yang jelas pada sasaran yang sebenarnya, serta model komunikasi yang transparan harus diciptakan guna membangun kepercayaan masyarakat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4145/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Lurah Ipiilo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Novita Djafar

NIM : S2118027

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : KELURAHAN IPILO KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS PERANAN LURAH DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN IPILO KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 29 Maret 2022

Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN 0929117202



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
 Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
 Nomor : 124/FISIP-UNISAN/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
 NIDN : 0924076701
 Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : NOVITA DJAFAR
 NIM : S2118027
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Analisis Peranan Kepala Kelurahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **22%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

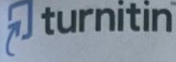
Mengetahui
 Dekan,

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
 NIDN. 0913078602

Gorontalo, 06 Juni 2022
 Tim Verifikasi,

Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
 NIDN. 0924076701

Terlampir :
 Hasil Pengecekan Turnitin

 **Similarity Report ID:** oid:25211:18937685

PAPER NAME
SKRIPSI_S2118027_NOVITA DJAFAR_A
NALISIS PERANAN KEPALA KELURAHAN
DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

AUTHOR
S2118027 NOVITA DJAFAR

WORD COUNT
6615 Words

CHARACTER COUNT
46155 Characters

PAGE COUNT
45 Pages

FILE SIZE
165.2KB

SUBMISSION DATE
Jun 16, 2022 12:56 PM GMT+8

REPORT DATE
Jun 16, 2022 12:57 PM GMT+8

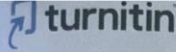
● **22% Overall Similarity**
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- 12% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

Summary

 **turnitin** Similarity Report ID: oid:25211:18937685

● **22% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 22% Internet database
- 12% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	eprints.umsida.ac.id Internet	6%
2	repository.uinsu.ac.id Internet	5%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	3%
4	b2p3ksjogja.kemensos.go.id Internet	2%
5	repository.uir.ac.id Internet	2%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet	2%
7	123dok.com Internet	2%
8	elib.unikom.ac.id Internet	<1%

Sources overview

ABSTRACT

NOVITA DJAFAR, S2118027. THE ANALYSIS OF THE ROLE OF THE URBAN VILLAGE HEAD IN THE COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM AT IPILO IN THE KOTA TIMUR SUBDISTRICT OF GORONTALO CITY

This study aims to find and analyze the role of the urban village head in the community empowerment program at Ipilo, Kota Timur Subdistrict of Gorontalo City. This study employs a qualitative method. The data collection technique covers interviews, observation, and documentation. The data analysis technique is interactive analysis. The results of the study on the role of the urban village head in the community empowerment programs at Ipilo, in general, are measured through three indicators of the theory or concept of the role. The urban village head has implemented it quite well. The role as a liaison or building a structural and social relationship with the urban village environment has been running under the basic concept of the personal role of the urban village head. The forms are the role of individuals, the role of conveying information, and the role of decision-makers. The empowerment program carried out at the Ipilo urban village head has impacted the interests of the surrounding community. The policy transformation system requires improvement. The suggestions in this study focus on several objects, namely the Ipilo urban village government, especially the urban village head can continue to commit to carrying out their roles in every program proclaimed to realize the success of the program's goals. The encouragement of the local urban village apparatus must also continue to exist in their leadership through motivation or persuasive communication to improve personal and institutional leadership. It will have an impact on a good and maximum assessment of the government and the community the urban village head leads.

Keywords: the role of the urban village head, community empowerment



**DOKUMENTASI DI KELURAHAN IPILO
KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO**



Kepala kelurahan beserta anggota babinsa dari TNI AD melakukan mediasi kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana di kelurahan ipilo.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Novita Djafar
 NIM : S2118027
 Tempat /Tgl Lahir : Gorontalo, 05 Agustus 1992
 Nama Ayah : Novri Abbas
 Nama Ibu : Suryati Djafar
 Alamat : Jln. Sultan Botutihe Kel. Ipilo
 Fakultas/ Prodi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Pemerintahan
 Jenjang : S1
 Judul Skripsi : Analisis Peranan Kepala Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo



SEKOLAH	MASUK/LULUS
SDN 05 KOTA GORONTALO	2000-2006
SMP NEGERI 05 KOTA GORONTALO	2006-2008
SMK NEGERI 2 KOTA GORONTALO	2008-2010
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	2018-2022